

Judul : Tingkatkan Layanan Transportasi Senayan Dukung Pembentukan BKT
Tanggal : Sabtu, 28 Januari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Tingkatkan Layanan Transportasi Senayan Dukung Pembentukan BKT

SENAYAN mendukung kebijakan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membentuk Badan Kebijakan Transformasi (BK) dalam menunjang kinerja di sektor perhubungan. Lembaga ini diharapkan mampu merumuskan kebijakan meningkatkan layanan transportasi di masyarakat.

Anggota Komisi V DPR Sudewo menuturkan, sudah sepatutnya jika *out put* dan *out come* dari program kebijakan kementerian dilakukan penilaian oleh suatu badan seperti BKT ini.

"Saya apresiasi pada Pak Menhub yang membuat lembaga

baru BKT ini. Ini langkah maju bagi institusi kementerian," kata dia, kemarin.

Badan yang baru dibentuk ini, lanjutnya, dapat merumuskan suatu kebijakan dalam pengelolaan transportasi darat, laut, dan udara. Sehingga nantinya kebijakan yang sudah berjalan ini dapat dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan di perhubungan.

Sudewo menuturkan, setiap kebijakan tentu ada kelemahan dan kekurangannya. Karena itu, sudah menjadi tugas BKT untuk melakukan suatu evaluasi apakah kebijakan itu tepat atau tidak.

"Dan andaikata kementerian lain itu membuat model yang semacam ini, saya yakin kebijakan-kebijakan yang akan diambil menjadi lebih baik, lebih sempurna, walau tidak seratus persen," jelasnya.

Dia lalu mengutip ungkapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyatakan bahwa 'Janganlah kita berjalan seperti barisan bebek. Satu ke sana, ke sana semua walau itu (arahnya) belum tentu benar.'

"Jadi, adakalanya barisan itu mengingatkan untuk melakukan evaluasi. Saya mendukung

Kemenhub melakukan evaluasi kebijakan," kata dia.

Dia berharap, evaluasi kebijakan yang dilakukan Kemenhub ini tidak hanya berimbas di internal kementerian saja, tapi juga di sektor lainnya. Misal, kebijakan di perindustrian terkait dengan pabrikasi kendaraan atau perdagangan terkait dengan kebijakan pajak penumpang transportasi.

Tapi secara keseluruhan berdampak pada pelayanan transportasi di perhubungan.

"Jadi sesuatu yang ideal ingin diberikan Kemenhub dalam bentuk pelayanan transportasi

baik darat, udara maupun laut tapi terkendala oleh kebijakan (kementerian) lain," ujarnya.

Dia berharap, program BKT nanti lebih memprioritaskan kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Di antaranya, aspek masalah keselamatan, aspek pelayanan, aspek sosial ekonomi masyarakat, semisal terkait keluhan masyarakat akan tarif tiket pesawat yang saat ini makin mahal.

Dia pun berharap, hasil kerja BKT nanti tidak hanya bentuk rekomendasi tapi juga bisa masuk dalam proses pengambilan kebijakan. ■ KAL